

PENGARUH TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

Zefri Maulana¹, Nasrul Kahfi Lubis^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa

²Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Email: zefrimaulana@iainlangsa.ac.id^{1*}, nasrulkahfi@unsam.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to prove the effect of Financial Reporting Transparency on the Quality of Financial Reporting in Medan City Government. The population of this study was 70 people who were Financial Administration Officers (PPK) and Technical Implementation Officials (PPTK). The sample was selected using non-probability sampling method based on accidental sampling (accidental sampling) totaling 57 people who returned the questionnaire. The data were processed using multiple linear regression statistical test methods by using SPSS software. In terms of testing financial reporting transparency affects the quality of financial reporting,

Keywords: Financial Reporting, Transparency, and Financial Reporting Quality

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk membuktikan pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan di Pemerintahan Kota Medan. Populasi penelitian ini yaitu sebanyak 70 orang yang merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sampel dipilih dengan menggunakan metode *non probability sampling* berdasarkan sampel kebetulan (*exidental sampling*) berjumlah 57 orang yang mengembalikan kuisioner. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linier berganda. dengan menggunakan *software* SPSS. Secara Pengujian transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan,

Kata kunci: Transparansi, Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Pendahuluan

Perkembangan otonomi daerah pada saat ini mencerminkan adanya respon masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), Dalam kutipan permana, Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independency (kemandirian), dan Fairness (kejujuran), sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak awal tahun 2002, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada Pedoman SAKD hasil Tim Pokja

SK Menkeu 355/2001 dan Kepmendagri No: 29/2002 dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan jawab Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk itu kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah sebanyak 169 Pemerintah Daerah berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh BPKP sebagai anggota Tim Pokja 355/2001. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2009 seluruh Indonesia hanya 10 (sepuluh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh gelar pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Pemerintahan Kota Medan merupakan daerah yang mendapat prediket opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Untuk 19 entitas lainnya dapat dikatakan kualitas pelaporan keuangan masih rendah. Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan kurangnya transparansi yang masih lemah.

Tabel 1.1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan
Tahun Audit 2009 - 2013

No	Tahun	Opini	Keterangan
1	2009	TMP	Tidak Memberikan Pendapat
2	2010	WDP	Wajar dengan Pengecualian
3	2011	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2012	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
5	2013	WTP DPP	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas

Sumber : BPK – RI tahun 2014

Berdasarkan hasil audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan opini audit yang semakin baik. Tahun 2009 LKPD Kota Medan diberi opini TMP dan pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi WTP. Walaupun empat tahun berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2013 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun selama empat tahun itu pula Pemerintahan Kota (Pemko) Medan menjadi kota yang berpotensi paling tinggi kerugian keuangannya dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut diketahui berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pada tahun 2011 Kota Medan menjadi daerah nomor satu berpotensi merugikan keuangan negara yakni sebanyak Rp 166 miliar, dengan 176 kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Dugaan penggelapan dana setoran pajak Samsat, sejumlah hotel, merdeka walk, dan restoran serta lainnya di tubuh Dinas Pendapatan Kota Medan mencapai puluhan miliar rupiah mulai terungkap. Duit negara yang seharusnya menambah target PAD guna

dialokasikan ke APBD Pemko Medan tahun 2014 hingga Maret 2015 itu diduga ditilap oknum pejabat. Kasus ini segera diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (www.mdn.biz.id/n/139015).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintah (SAP) pada angka 32 mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami (Aswadi, 2014). Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2011 hingga tahun 2014 yang belum disusun sesuai norma-norma dan prinsip akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan belum sepenuhnya bisa diyakini kewajarannya yang dapat menimbulkan indikasi perekayasaan. (Suwardjono, 2005).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan belum menunjukkan kualitas yang lebih baik. Kondisi ini terlihat dari sumber daya manusia yang belum mampu menunjukkan kualitasnya dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini terlihat dari pemimpin kota Medan baik Walikota maupun Gubernur masih terjerat dalam kasus hukumnya, untuk itulah dalam hal ini peneliti ingin mengkaji Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kualitas Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar entitas. Terdapatnya asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen, Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005:KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:KK-6) menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Pengertian Transparansi Pelaporan Keuangan

Stiglitz (1999) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi setiap manusia. Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat keputusan, peraturan dan informasi lain yang tampak dari luar (Hood, 2010). Hood (2007) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang input, output, dan outcome), proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan outcome), transparansi real-time (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut).

Heise (1985) dalam Rawlins (2008) menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya. Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (managemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Selanjutnya, Silver (2005) mendefinisikan transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi dalam praktiknya juga membutuhkan kepercayaan (Rawlins, 2008).

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Mohamad dkk. (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses

langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret*, *Secret*, *Confidential* dan *Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Shende dan Bennet, 2004).

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terus bergulir yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah yang mendahuluinya (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000). Hal ini merupakan upaya sinkronisasi menyusul keluarnya paket Undang-Undang pengelolaan keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) dan revisi paket Undang-Undang otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2004).

Badan usaha milik daerah yang mengedepankan adanya transparansi publik akan menjadi rentan akan kritik dari para pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan dapat melihat potret mengenai gambaran organisasi secara terbuka. Meyer dan Rowan (1977) mengidentifikasi bahwa organisasi akan mendapatkan legitimasi, stabilitas, dan sumber daya apabila sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Organisasi publik akan menghadapi risiko transparansi, dimana organisasi tidak dapat memastikan apa yang menjadi harapan pemangku kepentingan dan bagaimana pemangku kepentingan akan menggunakan informasi yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi publik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 tahun 2010). Di dalamnya terdapat Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif itu dapat diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas pelaporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibentuk untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat kerangka konsep yang dapat menggambarkan proses dan tujuan penelitian dengan terlebih dahulu membuat hipotesisnya untuk mencari pengaruh kualitas pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kota Medan. Adapun kerangka konsep sebelum dilakukan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) dan analisis jalur (*Path Analisis*) yang memperlihatkan pengaruh dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam skema dibawah ini:



Kerangka Konsep

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Terdapat pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Metode Penelitian

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Medan dengan ruang lingkup penelitian yaitu merupakan kajian dari Akuntansi Sektor Publik yang mengkaji tentang Kualitas Pelaporan Keuangan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah untuk melihat Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Maka data yang digunakan adalah data laporan keuangan pemerintahan daerah LKPD yang diperoleh dari Pemerintahan Kota Medan dari tahun 2009-2013 atau 5 (lima) tahun.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas dan Inspektorat: Badan dan Kantor pada Pemerintahan Kota Medan yang berjumlah 35 dinas.

Sampel menggunakan *non probability sampling* berdasarkan sampel kebetulan (*exidental sampling*), yaitu peneliti sengaja memilih sampel kepada siapapun yang ditemui peneliti atau *by accident* pada tempat, waktu dan cara yang telah ditentukan pada responden yang mengembalikan kuisisioner berjumlah 57 orang. Sampel ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena dipandang telah memiliki pemahaman terhadap situasi dan kondisi pelaporan keuangan yang ada di dalam SKPD serta terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai transparansi pelaporan keuangan..

Metode Analisis Data

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, uji data dalam variabel regresi yang digunakan bertujuan untuk mengetahui bahwa distribusi data dalam variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dalam penelitian ini dilihat dari normalitas nilai residual dengan menggunakan uji statistik berdasarkan nilai *Kolmogorov Smirnov* (K-S) dengan pedoman data dikatakan normal jika nilai *sig* pada kolom *Asymp.sig. (2-tailed)* > *level of significant* (α).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak ditemukannya korelasi antara variabel independen. Namun jika hal itu terjadi, salah satu cara untuk memperbaiki model tersebut adalah dengan menghapus variabel dari model regresi tersebut (Santosa dan Ashari, 2005). Untuk mendeteksi apakah model regresi kita mengalami multikolinieritas, dapat diperiksa menggunakan VIF. VIF merupakan singkatan dari Variance Inflation Factor. Nilai VIF > 10 berarti telah terjadi multikolinieritas yang serius di dalam model regresi kita.

Uji heteroskedastisitas

Salah satu asumsi regresi linier yang harus dipenuhi adalah Heterokedastisitas merupakan varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Kutner, dkk (2004) Wahlujo (2008) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi linier sederhana dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas jika tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat. Nilai *absolute residual* (*Abs. Res.*) dapat dilihat dari grafik scatterplott.

Pengujian Hipotesis

Model Regresi Linier Berganda

Untuk membuktikan hipotesis pertama digunakan model sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dalam hal ini:

- a = Konstanta
- β = Koefisien
- Y = Kualitas Pelaporan Keuangan
- X₁ = Tranparansi Pelaporan Keuangan
- e = Error

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian t dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel $t < \alpha 0,05$, maka H₀ ditolak, sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel $t > \alpha 0,05$, maka H₀ diterima. Adapun t tabel dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (*degree of freedom*). Kriterianya:

- Jika t hitung $>$ t tabel ($\alpha 0,05$) maka H₀ ditolak (berpengaruh)
- Jika t hitung $<$ t tabel ($\alpha 0,05$) maka H₀ diterima (tidak berpengaruh)

Uji Determinasi (R²)

Identifikasi koefisien determinasi ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika koefisien determinan (R²) semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) semakin kuat. Sebaliknya, jika koefisien determinan (R²) semakin kecil atau mendekati nol maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, simpulan yang dapat ditarik dari pengujian hipotesis tersebut seperti berikut:

Pengujian hipotesis membuktikan bahwa, Transparansi Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan yang menyatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan diperoleh nilai t-hitung (3.225) lebih besar dari t-tabel (2,004) dengan signifikansi 0,002 (Sig.< 0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan SKPD Kota Medan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel tekanan eksternal adalah 0,143 artinya setiap kenaikan variabel transparansi pelaporan keuangan sebesar 1% maka kualitas pelaporan keuangan akan meningkat sebesar 14,3% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Hasil penelitian di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk menerima hipotesis. Dari temuan ini diharapkan pelaksana tugas di SKPD Kota Medan tetap memiliki komitmen manajemen yang tinggi guna menunjang pelaporan keuangan yang berkualitas.

Untuk itu saran yang dapat disampaikan antara lain:

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk penelitian ini adalah:

1. Peneliti berikutnya dapat meningkatkan data penelitian setidaknya dapat menambah jumlah sampel penelitian. Hal ini penting mengingat instansi pemerintah saat ini banyak menjadi sorotan karena kasus penyelewengan yang terjadi. Sehingga, laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dengan tingkat transparansi yang tinggi menjadi penting bagi kepentingan masyarakat luas.
2. Peneliti berikutnya dapat menguji penelitian serupa dengan menambah variable independent yang belum dibahas oleh peneliti seperti kecermatan dan keseksamaan profesional, penguasaan standar akuntansi, etika pelaporan keuangan, standar laporan keuangan Pemerintah dan faktor lainnya.

Referensi

- Afrianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Aswadi, Sri Ayu Wulandari, 2014. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas pelaporan keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pinrang)*, Skripsi Akuntansi Univ. Hasanuddin, Makasar.
- Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Diamond, 2002. Structural Embeddedness of Political Top Executives as Explanation of Policy Isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. American Sociological Review.
- Fauzi, Eko. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Internal terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Universitas Riau.

- Fibrianti, Diana dan Raharjo, Ikhsan Budi, 2013, *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintahan Kota Surakarta*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2013.
- Fisher, 1996, Institutional Motivations in the Adoption of Innovations: The Case of E-Government. *Journal of Public Administration Research & Theory*
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. BPFE, Yogyakarta.
- Frumkin, P. Dan J. Galaskiewicz. 2004. *Instutional Isomorphism and Public Sector Organizations*. *Jurnal of Public Administration Research and Teory*.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi AnalisisMultivariate dengan program IBM SPSS 20*. Edisi Ke-6 Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi revisi, Jakarta, Salmeba Empat.
- Hanim, Sustika, 2009. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa*, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hess, D. 2007. *Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency*. *Business Ethics Quarterly*
- Hood, C. 2007. What happens when transparency meets blame-avoidance?. *Public Management Review*.
- Irvan Permana (2011), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Intakhan, P. dan P. Ussahawanitchakit. 2009. Earnings Management in Thailand: Effects on Financial Reporting Reliability, Stakeholder Acceptance and Corporate Transparency. *Journal of International Finance and Economics*
- Irianto, Agus. 2007. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Kencana, Jakarta.
- Johannes, Raja dan Suprianto, 2013, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Tranparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Pergakat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UPP STIM YKPN/
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm.

- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17/
- Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony. *The American Journal of Sociology*.
- Mizruchi, M. S. dan L. C. Fein. 1999. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.
- Mulyona, Budi, 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Vol. 2 No. 1, Mei.
- Mutmainah, Nurul, 2012, *Analisa Pengaruh Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
- P. Ayu Ratna Dewi, Ni Putu Sri Harta Mimba (2014), *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan di Pemerintah Kota Denpasar*.
- Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasojo et al. (2006), Appropriateness of Accounting Data in Performance Evaluation: An Empirical Examination of Environmental Uncertainty as An Intervening Variable. *Accounting, Organizations and Society*.
- Rahmawati, Anisa Dwi, 2014, *Analisa Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Maturitas Utang Terhadap Efisiensi Investasi*, Skripsi, Semarang: Univeritas Diponegoro.
- Rawlins, B. L. 2008. Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. *Public Relations Journal*
- Ridha, M. Rasyid dan Basuki, Hardo, 2012, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Managemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Sari, Diana, 2012, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi laporan Keuangan Peerintah Daerah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB) 2012 dengan tema Perkembangan Peran Aluntnasi Dalam Bisnis Yang Profesional dalam Proceedings ISSN-2252-3936.
- Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Shende dan Bennet, 2004. The Social Construction of Organizational Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism. *Administrative Science Quarterly*.
- Saufi Iqbal Nasution. 2009, Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara.
- Scott, W. R. 1997. The Adolescence of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly*
- Sihaloho, Johanes. 2013, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidak Pastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi.
- Sukmaningrum Tantriani dan Harto Puji, 2012, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi.
- Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan-I. Kencana, Jakarta.
- Sri Ayu Wullandari Aswadi, (2014), Pengaruh Akuntabilitas dan Trasnparansi Terhadap Kualitas pelaporan keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pinrang), Skripsi Akuntansi Univ. Hasanuddin, Makasar.
- Sukhemi, 2011, *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah*, Jurnal Akamenika UPY, Volume 8.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi: Perencanaan pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Silver, D. 2005. *Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes Marketplace, Public Relation Strategist*.
- Stiglitz, J. E, 1999, *On Liberty, the Right to Know and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life*, Oxford Amnesty, Oxford, U.K.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2014. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Jurnal Penelitian Dosen Gunadarma.
- Tuttle, B. dan J. Dillard. 2007. Beyond Competition: Institutional Isomorphism in U.S. Accounting Research. *Accounting Horizons*
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yudoyono, Bambang. 2001. Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: Pustaka Sinar.

- Yuliani, Safrida, Nardiansyah dan Bakar, Usman, 2010, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Banda Aceh)*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol.3 No. 2 Juli 2010.
- www.Medanseru.com , *Laporan Penggelapan Setoran Pajak di Dispenda Medan Segera ke KPK* (30 Mei 2015)
- www.mdn.biz.id/n/139015, *Tiga tahun Berturut-turut Raih WTP: Potensi Kerugian Keuangan Pemko Medan Paling Tinggi* (30 Mei 2015)
- www.mdn.biz.id/n/157114, *DPD Harap Pemda Terus Perbaiki Kinerja*, (10 April 2015)